



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI SUMBA BARAT DAYA

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman, kita patut memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pengasih dan Penyayang, karena hanya atas perkenananNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 yang ditujukan kepada Presiden. Dalam LKIP, yang disampaikan adalah pertanggungjawaban kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 untuk mewujudkan sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 s/d 2024.

Penyusunan LKIP Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 ini dapat terlaksana berkat kerja sama yang baik dari seluruh Perangkat Daerah (PD) dan Tim LKIP. Namun, dalam penyusunan LKIP ini masih terdapat banyak kekurangan, kendala, memenuhi standar LKIP yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan dalam Keputusan Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKIP ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam kerangka pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kinerja untuk pemerintahan daerah, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 s/d 2024.

Sekian dan Terima Kasih.

Tambolaka, 20 Maret 2025

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

RATU NGADU BONNU WULLA, S.T

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 – 2024 bersama rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), telah berkomitmen untuk Membangun Desa dengan Isu Strategis Revolusi Pertanian. Komitmen ini menjadi inspirasi yang membingkai arah kebijakan umum pembangunan daerah yakni pembangunan ekonomi kerakyatan dan pembangunan masyarakat.

Kebijakan tersebut di atas menjadi dasar desain percepatan pembangunan perdesaan yang dikemas dan dikristalkan melalui *Delapan Isu Strategis* yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, Percepatan aktifitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur sebagai pendukung sektor produksi dan pelayanan dasar masyarakat, Meningkatkan nilai tambah sektor primer melalui investasi daerah dan pengembangan sektor perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM, Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat baik secara formal dan informal, Memperbaiki akses sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat, Meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pariwisata alam dan budaya secara berkelanjutan, Menjamin keamanan dan ketertiban dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah, dan Mengembangkan pemerintahan yang akuntabel dan efektif. Kedelapan isu ini merupakan tolak ukur kesejahteraan yang menjadi sasaran (utama) masyarakat, oleh karenanya dimeteraikan dengan semboyan “*Revolusi Pertanian*”.

Dalam rangka mewujudkan Revolusi Pertanian sebagai Jembatan menuju kesejahteraan, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menentukan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Tercapainya ketersediaan pangan daerah dan rumah tangga yang cukup;
2. Meningkatnya produksi dan konsumsi pangan masyarakat;
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan.

Karena itu pemerintah bertekad untuk melakukan program peningkatan ketahanan pangan di Sumba Barat Daya yang meliputi :

1. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan;
2. Pengembangan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan yang bertumpu pada sumber daya lokal dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian harga pangan; dan
3. Penanggulangan kasus atau kejadian kerawanan pangan.

Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengeluarkan kebijakan strategis untuk mencapai revolusi pertanian yakni :

- 1) Untuk mendukung revolusi pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 telah mencapai indikator keberhasilan sebagai berikut :
 - a. Luas areal lahan panen padi 8,855 ha dengan produksi 37,369 ton atau rata-rata kemampuan produksi 3,5 ton /ha.
 - b. Luas areal lahan panen jagung 44,178 ha dengan produksi 23.693,7 ton atau rata-rata kemampuan produksi 3,5 /ha.
 - c. Luas areal lahan panen kacang kedelai 236 ha dengan produksi 373,7 ton atau rata-rata kemampuan produksi 1,1 ton /ha.
 - d. Luas areal lahan panen kacang tanah 466 ha dengan produksi 579 ton atau rata-rata kemampuan produksi 0,8 ton /ha.
 - e. Luas areal lahan panen kacang hijau 681 ha dengan produksi 441 ton atau rata-rata kemampuan produksi 0,8 Ton/ha.
 - f. Luas areal lahan panen ubi jalar 342 ha dengan produksi 2,345,3 ton atau rata-rata kemampuan produksi 7,1 ton/ha.
 - g. Luas areal lahan panen ubi kayu 4,535 ha dengan produksi 79,421 ton atau rata-rata kemampuan produksi 10 ton/ha.
- 2) Peningkatan mutu intensifikasi melalui penyediaan sarana produksi unggul dan bermutu, seperti Alsintan (Traktor Besar 34 buah, Hand Traktor 54 buah, Hands Prayer 115 buah , Alat Tanam (Kultiatu) 21 buah , Pompa Air 17 buah , alat tanam jagung 45 unit), benih, bibit, pupuk dan obat-obatan.
- 3) Pengembangan diversifikasi tanaman hortikultura.
- 4) Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah: Jagung, Pisang, Jambu Mete, Ubi, Kelapa, kerbau, kuda, sapi, babi dan kambing.
- 5) Peningkatan diversifikasi pangan lokal.
- 6) Pengembangan sistem mekanisasi pertanian untuk pengolahan lahan pengolahan lahan kritis / tidur dan DAS dengan pompanisasi.
- 7) Pembangunan & optimalisasi Daerah Irigasi.
- 8) Pengembangan Rumpun Laut & Budidaya ikan air tawar.
- 9) Peningkatan kelembagaan PPL (105) orang dengan peningkatan jumlah kunjungan 20.160 kali & (2.662) Kelompok Tani dan (141) Gapoktan.
- 10) Peningkatan pengolahan Paska Panen, telah dilatih petani.

Dari gambaran dan hasil diatas telah mengalami peningkatan luas areal tanam hasil produksi dan adanya peningkatan kemampuan produksi hasil pertanian secara makro yang memiliki korelasi dan signifikan secara langsung peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

A. Pelaksanaan Pembangunan

1. Terjadi peningkatan volume dan mutu infrastruktur pedesaan yang meliputi jalan raya, sekolah, puskesmas, pustu, polindes, jaringan air dan irigasi;
2. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelaksanaan delapan isu pokok sampai dengan awal tahun 2024 ini, menunjukkan hasil yang signifikan, yakni:
 - a. Sebagian besar masyarakat desa sudah menikmati sarana air.
 - b. Tidak ada lagi desa yang tidak bercahaya.
 - c. Kondisi pangan masyarakat masih cukup aman.
 - d. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat cukup kondusif dan terkendali.

Apresiasi tersebut di atas, merupakan ekspresi dari hasil Kerja keras, kerja cerdas dan kerja pintar yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam usaha mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah.

B. Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan 118 program dan 204 kegiatan (termasuk kegiatan penunjang) dengan 141 indikator sasaran. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 untuk mencapai 55 sasaran dari 55 sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 55 sasaran yang dilaksanakan adalah 55. Keberhasilan / kegagalan ini disumbangkan oleh 29 sasaran yang sangat berhasil mencapai 85%-100% atau lebih, 6 sasaran yang **berhasil** mencapai 70%-84%, 12 sasaran yang cukup berhasil mencapai 55%-69%. 8 Sasaran yang tidak berhasil mencapai < 50%. Dan terdapat Perincian keberhasilan / kegagalan sasaran-sasaran tersebut, dapat diikuti pada 4 tabel di bawah ini:

Tabel 1: Sasaran yang dikategorikan *Sangat Berhasil*:

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (85%-100%/lebih)
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	146 %
2	Tumbuhnya perekonomian daerah secara stabil dan berkelanjutan	112,20%
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	88%
4	Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	100%
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	94%
6	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan	105%
7	Meningkatnya persentase pembahasan Ranperda dan risalah rapat	95,60%
8	Meningkatnya aspirasi masyarakat	97,99%
9	Meningkatnya pelayanan publik dan Kualits Sumber Daya Aparatur (Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyebarluasan Informasi)	100
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	85,55%
12	meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah	174,36%
13	Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan	89%
14	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meningkatkan kesetaraan gender di kalangan masyarakat	99,53%
15	Meningkatnya luasan daerah produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan	86,41%
16	Meningkatnya cakupan keluarga berencana	88,50%
17	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	223,67%
18	Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang di berdayakan	100%
19	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%
20	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakuoan Kabupaten/Kota	100%
	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	129,84%
21	meningkatnya produk hukum yang berkualitas	100%
22	meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan kadarkum	100%
23	Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas	100%
24	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	100%
25	meningkatnya toleransi antar umat beragama	95%

26	meningkatnya produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan	89,68%
27	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional	96,74%
28	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pendidikan masyarakat	124%
29	Berkembangnya Pariwisata Daerah dan Pelestarian Budaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian	100%

Tabel 2: Sasaran yang dikategorikan **Berhasil**

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (70%-84%)
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	76,82%
2	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	76,67%
3	Meningkatnya Usaha Mikro	80%
4	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	76%
5	Meningkatnya IKM serta Industri Kecil	70%
6	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Prestasi Keolahragaan	77,6%
7	Meningkatnya pelayanan pengelolaan aset	80%

Tabel 3: Sasaran yang dikategorikan *Cukup Berhasil*

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (55%-69%)
1	Menurunnya Angka Kematian Jumlah Balita Gizi Buruk	65%
2	Meningkatnya Indikator Pelayanan SPM	65%
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni	56%
4	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	63,45%
5	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah yang profesional, transparan, bersih dan melayani	62,06%
6	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	68%
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan	62,44%
8	Meningkatnya Jumlah Koperasi	58,93%
9	Berkurangnya kemiskinan	60,73%
10	Meningkatnya Perdagangan dalam daerah	65%
11	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	69,44%
12	Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik	69,02%

Tabel 3: Sasaran yang dikategorikan *Tidak berhasil*

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (55%-69%)
1	Menurunnya jumlah <i>Stunting</i>	0,83 %
2	Menurunnya Angka Kematian Bayi	-15 %
3	Menurunnya Angka Kematian Ibu	-7%
4	Menurunnya Angka Jumlah Kasus Malaria	4%
5	Meningkatnya akses transportasi pada pusat permukiman	0,813%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Kebencanaan	-15%
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	36%
8	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	36%
9	Meningkatnya rumah berakses air bersih	25,3%

Keberhasilan sasaran-sasaran pada tabel 1 dan 2 tersebut di atas, secara umum disebabkan yaitu :

1. Perencanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut menjadi prioritas pada tahun 2024
2. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut taat azas efisiensi dan efektivitas
3. Meningkatnya kualitas disiplin dan etos kerja aparatur pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
4. Meningkatnya kualitas pengawasan atau pengendalian dari pimpinan, instansi berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran pada table 3 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber pembiayaan dalam mendukung perencanaan program dan kegiatan sehingga tidak terlaksana secara optimal
2. Keterbatasan sumberdaya manusia aparatur pegawai, baik kuantitas maupun kualitas, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan atau stagnasi dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sehingga operasionalisasi kerja aparatur pegawai kurang optimal untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan dan kurang berhasil pencapaian sasaran-sasaran tersebut ke depan yaitu :

1. Perencanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, perlu dikendalikan secara baik melalui asistensi dengan mengacu pada pencapaian kinerja-kinerja sebelumnya dan kapasitas daya dukung aparatur yang ada, sehingga taat asas efisiensi dan efektivitas.
2. Meningkatkan disiplin kerja dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kerja aparatur pegawai.
4. Perlu regulasi dan kebijakan pimpinan uji kelayakan dan kepatuhan/fit and propertest untuk memotivasi jabatan II, yang mengatur adanya *Penghargaan dan Penghukuman* bagi para pimpinan Perangkat Daerah (PD) yang mencapai kinerja *Berhasil dan Tidak Berhasil*, sehingga terjadi kompetisi antar-PD untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut.
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Tambolaka, 20 Maret 2025

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

RATU NGADU BONNU WULLA,S.T

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Sumba Barat Daya yang relatif muda pada usia Enam Belas tahun setelah mekar dari Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2007 dan menjadi salah satu dari 22 kabupaten/kota madya dalam wilayah administratif pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan kontribusi pelayanan secara maksimal dan memadai untuk menyamakan dirinya dengan kabupaten lain, bahkan kalau boleh dikatakan cukup melejit pesat bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami proses pemekaran pada saat yang sama.

Sumba Barat Daya memiliki semboyan ***Loda Wee Maringi Pada Wee Malala*** yang meliputi 11 (sebelas) wilayah kecamatan yang terdiri dari 173 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan – kecamatan dimaksud adalah Kodi Balaghar, Kodi Bangedo Kodi, Kodi Utara, Kota Tambolaka, Loura, Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Wewewa Tengah, Wewewa Timur, Wewewa Utara. Secara geografis memiliki luas wilayah daratan 1.445,32 km², panjang garis pantai 95,75 km dan luas perairan 73.262,65 ha. Keadaan topografinya variatif meliputi wilayah pegunungan, wilayah perbukitan, wilayah undukan, wilayah dataran. Keadaan luas hutannya 14.990,14 Ha dari luas kabupaten. Keadaan iklimnya, musim kemarau 3-4 bulan yaitu pada Bulan Juni sampai dengan September dan musim hujan 4 bulan yaitu pada Bulan Desember sampai dengan Bulan Maret bulan. Temperatur rata-rata Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya berkisar antara 21°C – 34 °C.

Jumlah penduduknya, berdasarkan data, keadaan 2024, sebesar 340.006 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 173.292 Jiwa dan perempuan sebanyak 166.714 jiwa . Mata pencaharian utama masyarakat yakni petani (85 %).

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yakni menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan membina pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok dan fungsi ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UU) 1945 dan *Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah Kabupaten,

diambil kembali dan diserahkan kepada provinsi untuk melaksanakannya dan beberapa kewenangan kembali kepada Pusat.

Hal ini menjadikan rentang kendali untuk mengintervensi dan mengendalikannya menjadi lebih panjang. Namun demikian, dalam konteks NKRI, dipandang dari hal yang positif, bahwa kewenangan yang dialihkan tersebut menjadi lebih baik jika dilaksanakan oleh Provinsi atau Pusat dengan Sumber Daya yang lebih memadai yang dimilikinya dan fungsi koordinatif yang lebih besar serta bersifat lintas Kabupaten/Kota dan Lintas Provinsi.

Pada pelaksanaan di tingkat Kabupaten, perlu diatur ulang untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, kemampuan melaksanakan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari apabila dilaksanakan audit kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dukungan Pemerintah Pusat tersebut dimaksudkan untuk menciptakan otonomi daerah yang kuat. Namun demikian, demi terwujudnya otonomi daerah yang bertanggung jawab, pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), maka pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi harus tetap mengacu dan sejalan dengan arah kebijakan dan program pembangunan pada aras nasional (dan juga provinsi).

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah tersebut di atas, mutlak dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat baik langsung maupun melalui Pemerintah Provinsi. Instrumen sebagai media pertanggungjawaban, dilegitimasi melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Dasar acuan dalam penyusunan LKIP adalah Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab I Ayat 11, disebutkan Laporan Kinerja adalah lktisar yang menjelaskan secara ringkat dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sedangkan Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana dimaksud paling sedikit menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian target kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program dengan tahun berjalan dengan target kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Daerah.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024. LKIP ini menggambarkan kinerja yang dicapai, berhasil atau gagal, atas pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai Rencana Strategis Kabupaten untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP juga dapat merupakan sarana untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sehingga kinerja yang dicapai lebih berdayaguna dan berhasilguna.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat penyusunan LKIP, sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Permen PAN-RB 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1. Organisasi Perangkat Daerah

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana beberapa urusan yang selama ini menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dialihkan menjadi Urusan Provinsi dan Pusat. Peralihan kewenangan ini ditindaklanjuti dengan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (Pasal 404, UU 23/2014).

Perubahan yang terjadi ini berdampak kepada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan daerah untuk kurun waktu 2019-2024, yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024.

Penanggung jawab program mengalami perubahan akibat adanya perubahan kelembagaan karena beberapa perangkat daerah yang urusannya sudah menjadi kewenangan Pusat/Provinsi dilakukan penghapusan atau penggabungan dengan perangkat daerah yang lainnya, serta adanya

pembentukan perangkat daerah baru untuk melaksanakan optimalisasi fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai implikasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang perangkat daerah yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Terkait hal-hal tersebut, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, maka dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024, untuk menyesuaikan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten saat ini, terkait pembentukan perangkat daerah (yang lama dan yang baru), program yang dilaksanakan, serta target kinerja pembangunan yang ditetapkan.

Review terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024, dilaksanakan melalui kajian terhadap beberapa kebijakan yang berkaitan dengan regulasi perencanaan dan penganggaran yang berlaku saat ini, telaahan terhadap batang tubuh RPJMD (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Indikator Kinerja serta perangkat daerah penanggung jawab) untuk mengetahui keselarasan dan kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah serta kemampuan untuk melaksanakan dan mencapai target kinerja pembangunan.

Regulasi penjabaran dari Undang-undang 23 Tahun 2014, baru ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan kewenangan Urusan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan perumpunan urusan yang menjadi acuan dalam pembentukan perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Implikasi dari pembentukan perangkat daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, terdapat Urusan yang sudah tidak dilaksanakan lagi oleh perangkat daerah yang lama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, yaitu : Urusan

Kelautan, Urusan Kehutanan dan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga dihilangkan dan penggabungan perangkat daerah sesuai perumpunan yang diarahkan dengan mengacu kepada hasil pemetaan urusan pemerintahan dan jenis, kriteria serta tipologi Perangkat Daerah.

Adanya perubahan kebijakan yang berkaitan dengan Otonomi Daerah ini, memerlukan revisi terhadap dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024, khususnya yang berkaitan dengan perangkat daerah penanggung jawab program, dan target kinerja pembangunan yang terukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dan sudah tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengintegrasikannya melalui program yang dilaksanakan, sehingga penganggaran pembangunan lebih difokuskan kepada program dan target kinerja yang menjadi kewenangan daerah, sementara itu untuk pencapaian target kinerja yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat akan dikoordinasikan melalui forum-forum perencanaan dan penganggaran tingkat Provinsi dan Pusat agar dapat tetap berkesinambungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut :

- a. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
- b. Dinas terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 4) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 5) Dinas Pariwisata;
 - 6) Dinas Perikanan;
 - 7) Dinas Penanaman Modal dan Perijinan dan terpadu Satu Pintu ;
 - 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah;
 - 10) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 12) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 14) Dinas Lingkungan Hidup;

- 15) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 16) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - 17) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 18) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 19) Dinas Sosial;
 - 20) Dinas Perhubungan;
 - 21) Inspektorat;
 - 22) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 23) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 24) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Badan terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida);
 - 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
 - 3) Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Unit-Unit Otonom, dibawah koordinasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- 1) Bagian unit terdiri dari:
 - (1) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - (3) Bagian Hukum;
 - (4) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - (5) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - (6) Bagian Umum;
 - (7) Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - (8) Bagian Organisasi;
 - (9) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 2) Kecamatan unit terdiri dari :
 - (1) Kecamatan Kota Tambolaka;
 - (2) Kecamatan Loura;
 - (3) Kecamatan Kodi;
 - (4) Kecamatan Kodi Bangedo;
 - (5) Kecamatan Kodi Utara;
 - (6) Kecamatan Blaghar;
 - (7) Kecamatan Wewewa Timur;
 - (8) Kecamatan Wewewa Utara;
 - (9) Kecamatan Wewewa Tengah;
 - (10) Kecamatan Wewewa Barat;
 - (11) Kecamatan Wewewa Selatan.
 - 3) Kelurahan unit terdiri dari:
 - (1) Kelurahan Waitabula;
 - (2) Kelurahan Langga Lero.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Sampai dengan Bulan Desember 2024, keadaan pegawai yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut latar belakang pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah orang		TOTAL
		PNS	PPPK	
1	Sarjana S2	50	46	96
2	Sarjana S1	1.891	1.135	3.026
3	Diploma 3	698	142	840
4	Diploma 2 & 1	115	0	115
5	SLTA	306	33	339
6	SLTP	12	0	12
7	SD	6	0	6
	Total seluruh	3.078	1.356	4.434

b. Menurut golongan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah orang		TOTAL
		PNS	PPPK	
1	Golongan IV	395	0	395
2	Golongan III	2.302	0	2.302
3	Golongan II	371	0	371
4	Golongan I	10	0	10
5	Golongan X		45	45
6	Golongan IX		1136	1.136
7	Golongan VII		142	142
8	Golongan V		33	33
7	Tenaga Kontrak			
	Total seluruh	3.078	1.356	4.434

c. Menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan yang diikuti tahun 2024:

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	Pim II	-
2	Pim III	-
3	Pim IV	-

d. Menurut Jabatan Struktural :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah orang		TOTAL
		PNS	PPPK	
1	II/a	-	-	-
2	II/b	31	0	31
3	III/a-b	146	0	146
4	IV/a-b	166	0	166
Total seluruh		361	-	361

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai daerah otonom baru telah dan sedang melaksanakan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana strategis, baik untuk kebutuhan perkantoran dan pelayanan umum.

a. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran yang disampaikan disini terbatas pada keadaan kendaraan operasional dan gedung kantor, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Kendaraan	
	a. Roda Empat	273
	b. Roda Dua	916
2	Gedung	
	a. Kantor kabupaten	35
	b. Kantor kecamatan	11
	c. Kelurahan	2

b. Sarana Pelayanan Umum

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Gedung	
	a. Pasar	16
	b. Puskesmas	16
	c. Poskesdes	48
	d. Polindes	41
	e. Pustu	49
	f. Posyandu	586
2	Jalan Raya	
	a. Jalan Negara	37,20
	b. Jalan Provinsi	83,07
	c. Jalan Kabupaten	1136,31
3	Dermaga	2 unit
4	Bandar Udara	1 unit

D. PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI

1. BIDANG PENDIDIKAN

Bahwa terkait persoalan Angka Persentase cakupan pendidikan anak usia dini (paud) (%) di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 sebesar 46%, Angka Putus sekolah SD/MI (%) di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 sebesar 40% dan angka persentase sekolah berakreditasi A (%) sebesar 0,29 % kondisi ini masing sangat meprihatinkan karena angka ini juga tergolong rendah.

2. BIDANG KESEHATAN

Persentase Kasus stunting sebesar 32 %, kasus menurunnya angka kematian sebesar – 15%, menurunnya angka kematian ibu sebesar -7 %, menurunnya jumlah kasus malaria sebesar 4 %, idikator-indikator tersebut belum mencapai target dan di nyatakan tidak berhasil yang di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu

- Tingkat pendidikan orang tua yang rendah yang menyebabkan orang tua tidak mampu menyediakan asupan yang bergizi bagi anak-anak mereka.
- Faktor ekonomi yang rendah
- ANC yang tidak berjalan dengan baik
- Tingkat pemahaman dan kesadaran ibu hamil masih rendah
- PNC yang tidak berjalan
- Masih rendahnya tingkat pengetahuan ibu
- Kurangnya dukungan psikologi dari keluarga
- Perilaku hidup bersih sehat masyarakat masih rendah
- Salah pola asuh pada pemberian makan pada balita

3. BIDANG SOSIAL

Permasalahan yang di hadapi oleh dinas sosial Kabupaten Sumba barat Daya yaitu terkait persoalan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti social pada tahun 2024 dengan target 480 jiwa, realisasi 175 jiwa dengan pencapaian target hanya sebesar 36% yang disebabkan oleh

- a. Keterbatasan anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan/program demi pencapaian Visi/Misi Dinas Sosial
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan masih banyaknya jabatan struktural yang lowong (Kepala Bidang, Kasubag dan Kasie)
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana

4. INSPEKTORAT

Setiap tahunnya, Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja diperoleh dari hasil evaluasi AKIP Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Kementerian PAN-RB. Untuk

hasil evaluasi tahun 2024, telah dirilis bahwa capaian nilai SAKIP 50,05 (CC).capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan sehingga inspektorat bersama dengan seluruh perangkat daerah lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya perlu berupaya lebih maksimal dalam pencapaian hasil SAKIP yang lebih lagi.

5. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Permasalahan yang di hadapi oleh dinas PUPR Kabupaten Sumba barat Daya yaitu terkait persoalan :

- a. Persentase penduduk berakses air minum sebesar 25 %
- b. Cakupan pengurangan sampah sebesar 0,00%
- c. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0,00 %
- d. Cakupan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 0,00%
- e. Cakupan infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik sebesar 0,00%
- f. Rasio pembangunan ber-IMB per satuan bangunan sebesar 7%
- g. Cakupan tenaga terampil konstruksi bersertifikat sebesar 0,00%
- h. Cakupan ketaatan terhadap RTRW sebesar 38 %

Hambatan atau permasalahan yang terjadi terkait capaian kinerja indikator tidak berhasil di sebabkan oleh :

- Program/kegiatan yang memihak pada penyediaan akses air minum masih minim
- Masih adanya sarana fisik yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bencana dan tidak ditangani secara optimal
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana yang sudah terbangun
- Belum tersedianya kelembagaan ditingkat Kabupaten yang mengelola air minum.
- Kurang memadainya anggaran
- Kurang tersedianya sumber daya manusia yang terlatih.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana dan prasarana yang sudah dibangun.

6. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Terdapat 2 sasaran yang mengalami permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Terkait jumlah warga yang terkena relokasi akibat program PEMDA yang mendapat fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yaitu sebesar 0 %.
- b. Terkait cakupan rumah layak huni sebesar 46%

Hal tersebut disebabkan oleh :

- Kurang memadainya anggaran
- Kurang tersedianya sumber daya manusia yang terlatih.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana dan prasarana yang sudah dibangun

7. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Rasio petugas Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 berjumlah 24 orang sangat rendah di bandingkan jumlah penduduk sebesar 340.006.

8. LINGKUNGAN HIDUP

Permasalahan yang sampai saat ini di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah belum tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang di sebabkan oleh kurang memadainya anggaran.

9. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Terkait Capaian Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024, adalah indikator terkait rasio pasangan berakate nikah sebesar 17 % yang tidak berhasil yaitu

- a. Masih banyak penduduk yang masih enggan untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan, mereka baru mau mengurus jika mempunyai kebutuhan yang sudah mendesak.
- b. Sulitnya aksesibilitas sebagian penduduk karena pelayanan terpusat di Kabupaten.
- c. Terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki dalam hal ini mobil pelayanan keliling.

10. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Capaian Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 dapat digambarkan dalam beberapa indikator yang tidak berhasil yang meliputi : Cakupan desa yang memiliki profil desa dan evaluasi perkembangan desa adalah sebesar 0 %, cakupan peningkatan jumlah industry rumah tangga pedesaan yang menggunakan teknologi tepat waktu adalah 0 %, Cakupan desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi yang produktif adalah 0 %

Hal tersebut di sebabkan oleh :

- Kemampuan ekonomi warga masih di bawah target pendapatan rata-rata nasional

- Kreatifitas pemerintahan desa dalam mengeksplorasi dan mengelola sumber daya yang ada masih kurang
- Masih banyaknya keluarga miskin yang belum terbantu

11. PERHUBUNGAN

Kinerja pelayanan umum urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan bahwa realisasi/capaian kinerja yang di capai pada indikator kinerja yang meliputi cakupan jalan kabupaten yang di lengkapi perlengkapan jalan, jumlah terminal tipe C yang di bangun dan cakupan pelayanan jasa kebandarudaraan bernilai 0 (nol) hal ini di sebabkan karena tidak tersedianya sumber dana financial sarana dan prasarana dan persyaratan yang memadai.

12. PEMUDA DAN OLAH RAGA

Berdasarkan data yang ada, tingkat keberhasilan, kegagalan serta hambatan yang dialami selama ini di hasilkan oleh 2 indikator yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kurangnya pendanaan pada beberapa program dan kegiatan yang mengakibatkan tidak maksimalnya dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Belum tersedianya fasilitas olah raga milik Pemda di Kab. SBD
- c. Belum adanya fasilitas kepemudaan berupa balai remaja

13. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Capaian kinerja BKPSDM pada indikator persentase jumlah pengadaan pejabat PT/PA/PP yaitu sebesar 37 % . hal ini menunjukkan bahwa indikator persentase jumlah pengadaan pejabat PT/PA/PP dapat dikatakan tidak berhasil, karena pengadaan pejabat PT yang dianggarkan untuk dilaksanakan satu kali di tahun 2024 tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu yang ada.

A. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Bagian Organisasi, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran serta rencana Anggaran Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Pernyataan Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 - 2024 yakni :

“Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat Daya yang maju, berkualitas, berdaya saing, demokratis dan sejahtera”.

2. Pernyataan Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 - 2024, yakni :

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang maju dan berkualitas, didukung sarana dan prasarana kehidupan yang layak dan memadai.
- b. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, bersih, efektif dan terpercaya.
- c. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang sejahtera.

3. Penetapan Tujuan

Tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut :

- a. Misi *“Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang maju dan berkualitas, didukung sarana dan prasarana kehidupan yang layak dan memadai”* dengan tujuan :
 1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
 2. Meningkatkan jumlah kualitas perumahan/permukiman dan lingkungan hidup.
 3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas publik, pelayanan transportasi dan komunikasi.

4. Meningkatkan Kualitas infrastruktur penunjang usaha perekonomian masyarakat.
- b. Misi *“Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, bersih, efektif dan terpercaya”* dengan tujuan :
1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah.
 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik.
 3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah.
- c. Misi *“Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang sejahtera”* dengan tujuan:
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan antar kelompok masyarakat serta terwujudnya ketertiban dan keamanan di masyarakat.
 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meningkatkan kesadaran gender di kalangan masyarakat.
 3. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan dalam mmenopang ketersediaan bahan pangan.
 4. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja, kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keluarga berencana.
 5. Meninngkatkan pariwisata dan mewujudkan pelestarian budaya dan adat-istiadat.
 6. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pengembangan peluang usaha mikro kecil, menengah (UMKM), koperasi, indistri kecil (*home industry*) dan perdagangan serta meningkatnya penanam modal.

d. Penetapan Sasaran

Terdapat perubahan terhadap sasaran, khususnya terkait dengan kalimat yang mengindikasikan adanya kewenangan yang sudah dialihkan kepada pemerintah Provinsi dan Pusat. Perubahan sasaran RPJMD dilakukan pada tabel keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran.

Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

NO	SASARAN
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
2	Menurunnya jumlah <i>Stunting</i>
3	Menurunnya Angka Kematian Bayi
4	Menurunnya Angka Kematian Ibu
5	Menurunnya Angka Jumlah Kasus Malaria
6	Menurunnya Angka Kematian Jumlah Balita Gizi Buruk
7	Meningkatnya Indikator Pelayanan SPM
8	Meningkatnya Rumah Layak Huni
9	Tumbuhnya perekonomian daerah secara stabil dan berkelanjutan
10	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah
11	Meningkatnya akses transportasi pada pusat permukiman
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
13	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
14	Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah
15	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
16	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah yang profesional, transparan, bersih dan melayani
17	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan
18	Meningkatnya pelayanan pengelolaan aset
19	Meningkatnya persentase pembahasan Ranperda dan risalah rapat
20	Meningkatnya aspirasi masyarakat
21	Meningkatnya pelayanan publik dan Kualits Sumber Daya Aparatur (Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyebarluasan Informasi)
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
23	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
24	meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah
25	Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan

26	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meningkatkan kesetaraan gender di kalangan masyarakat
27	Meningkatnya luasan daerah produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan
28	Meningkatnya cakupan keluarga berencana
29	Meningkatnya kunjungan wisatawan
30	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Kebencanaan
31	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
32	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
33	Berkurangnya kemiskinan
34	Meningkatnya Jumlah Koperasi
35	Meningkatnya Usaha Mikro
36	Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang di berdayakan
37	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
38	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial
39	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
40	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
41	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota
42	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk
43	Meningkatnya Perdagangan dalam daerah
44	Meningkatnya IKM serta Industri Kecil
45	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
46	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Prestasi Keolahragaan
47	meningkatnya produk hukum yang berkualitas
48	meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan kadarkum
49	Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas
50	Meningkatnya rumah berakses air bersih
51	Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik
52	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian
53	meningkatnya toleransi antar umat beragama
54	meningkatnya produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

55	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional
56	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pendidikan masyarakat
57	Berkembangnya Pariwisata Daerah dan Pelestarian Budaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian

e. Rencana Anggaran

Rencana Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2024 sebesar Rp. **890.133.870.240**

terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Pegawai	369.350.664.721,00
2	Belanja Barang dan Jasa	355.638.300.148,00
3	Belanja Modal	165.144.905.371,00
J u m l a h		890.133.870.240

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. PENETAPAN KINERJA

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, melalui penyelarasan RKT dan PK 2024 dengan Perubahan Anggaran tahun 2024.

3. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan

sasaran melalui media berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “Skala Pengukuran Ordinal” sebagai berikut :

No	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	< 55 %	Tidak berhasil

4. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2024, sebagai berikut

Sasaran 1: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 146 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 sasaran dan 2 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	100	97	97
2	Pembudayaan gemas membaca tingkat daerah	100	98	98

Sasaran 2: Menurunnya jumlah *Stunting*

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 0,83 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 program dan 4 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prevalensi Stunting	42	35,7	0,83

Sasaran 3: Menurunnya Angka Kematian Bayi

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai -15 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 4 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	0	15	-15

Sasaran 4: Menurunnya Angka Kematian Ibu

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai -7 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 2 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Kematian Ibu	0	7	-7

Sasaran 5: Menurunnya Angka Jumlah Kasus Malaria

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 4 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 2 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prevalensi Malaria	<5	16,64	4

Sasaran 6 : Menurunnya Angka Kematian Jumlah Balita Gizi Buruk

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 65 % dengan predikat Cukup berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 Program dan 2 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat pelayanan	100	65	65

Sasaran 7 : Meningkatnya Indikator Pelayanan SPM

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 65 % dengan predikat cukup berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 2 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Pelayanan SPM	100	65	65

Sasaran 8: Meningkatnya Rumah Layak Huni

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 56 % dengan predikat cukup berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan menetapkan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran , Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	100	18,52	18,52
2.	Cakupan rumah layak huni	81,70	81,21	99,40

Sasaran 9 : Tumbuhnya perekonomian daerah secara stabil dan berkelanjutan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 112,20`% dengan predikat sangat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 10 Program dan 19 kegiatan dengan menetapkan 11 indikator kinerja Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Produksi perikanan tangkap(ton)	696,48	1600,100	230
2.	Cakupan Bina Kelompok nelayan (%)	60	60	100
3.	Nilai tukar nelayan(Rp)	1.159.000	1.159.000	100
4.	Produksi perikanan budidaya (ton)	37	34,405	93
5.	Cakupan bina kelompok budidaya perikanan (%)	60	60	100
6.	Cakupan pengawasan sumber daya perikanan (%)	60	60	100
7.	Konsumsi ikan(kg)	4,5	5,04	112
8.	Jumlah dokumen yang mendukung iklim penanaman modal yang kondusif	2 dok	2 dok	100
9.	Pembuatan video promosi penanaman modal	1 video	1 video	100
10.	Persentase penyelesaian permasalahan dibidang penanaman modal	100	100	100
11.	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	2000 izin	1141 NIB dan 1067 Non perizinan	99,27

Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektifitas daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 76,82 % dengan predikat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan menetapkan 1 indikator kinerja Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cakupan Daerah Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik	79,85	61,34	76,82

Sasaran 11 : Meningkatnya akses transportasi pada pusat permukiman

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 0,813 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program, 3 Kegiatan dengan 8 indikator dan 1 sasaran kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	100	0	0
2	Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dibangun	1	0	0
3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	151454	0	0
4	Rasiom Ijin Trayek	120	0	0
5	Jumlah Uji KIR angkutan Umum	814	123	0,15%
6	Jumlah angkutan darat yang melaksanakan aktivitas bongkar muat di pelabuhan (unit)	10800		
7	Cakupan Kepemilikan KIR angkutan umum	100	5,31	0,053%
8	Cakupan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	0		

Sasaran 12 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 88 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 3 Program, 8 Kegiatan dengan 2 indikator dan 1 sasaran kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan program usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	70%	84%	84%
2	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	2 dok	2 dok	93%

Sasaran 13: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 63,45 % dengan predikat cukup berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan menetapkan 1 indikator kinerja Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Skor hasil evaluasi Sakip Pemerintah Daerah	78,88	50,05	63,45

Sasaran 14: Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan menetapkan 1 indikator kinerja Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100

Sasaran 15: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 94 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan dengan menetapkan 1 indikator kinerja Pencapaian target kinerja tampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Pegelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	30.357.750	28.829.293	94

Sasaran 16: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah yang profesional, transparan, bersih dan melayani

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 62,66 % dengan predikat cukup berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Skor Hasil Evaluasi LAKIP	79,88	50,05	62,66

Sasaran 17: Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 105 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 program dan 5 kegiatan dengan 3 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Dokumen Anggaran yang ditetapkan	6	6	100
2	Opini BPK atas audit LAKIP	100	100	80
3	Persentase SILPA terhadap APBD	7,01	6,41	116,05

Sasaran 18: Meningkatnya pelayanan pengelolaan aset

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 80 % dengan predikat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Aset Daerah yang tercatat dalam KIB	100	80	80

Sasaran 19: Meningkatnya persentase pembahasan Ranperda dan risalah rapat

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 95,60 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 program dan 3 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase fasilitasi pencapaian pembahasan Ranperda	100	95,60	95,60

Sasaran 20: Meningkatnya aspirasi masyarakat

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 97,99 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 program dan 9 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase laporan hasil kegiatan Reses DPRD	100	97,99	97,99

Sasaran 21 : Meningkatnya pelayanan publik dan Kualiatas Sumber Daya Aparatur (Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyebarluasan Informasi)

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 Program, 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapain target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang taat aturan	100	100%	100%

Sasaran 22 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 85,52 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 2 Program, 2 Kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapain target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara terpadu	100	90	90
2	Indek kepuasan Masyarakat	100	83,03	83,03

Sasaran 23 : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 68 % dengan predikat cukup berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 Program, 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja

pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase PAD terhadap pendapatan	5,40	3,69	86%

Sasaran 24 : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Daerah

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai **174,36 %** dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 5 Program dan 12 kegiatan dengan 4 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		%Pencapaian target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemutakhiran data kepegawaian	90	93,6	104
2	Persentase jumlah pengadaan pejabat PT/PA/PP yang dilakukan dengan metode kompetitif	90	33,3	37,03
3	Persentase PNS yang mengikuti diklat	100	100	100
4	Indeks pengelolaan arsip	100	59	59

Sasaran 25: Meningkatnya ketersediaan Aksesibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 89 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, ditetapkan 1 Program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keamanan)	100	95	95
2	Cakupan Penegakan Perda %	100	85	85

Sasaran 26: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Meningkatkan Kesenjangan Gender Di Kalangan Masyarakat

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,53 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dengan 3 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	99,43	99,31	99,31
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,36	100	100
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan (%)	2,35	99,65	99,65

Sasaran 27 : Meningkatnya Luasan Daerah Produksi Pertanian Dan Perkebunan Serta Meningkatnya Produksi Pertanian Dan Perkebunan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 86,41 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) Program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan menetapkan 5 indikator kinerja pencapaian sasaran, Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Luasan Daerah Pertanian (Ha)	52.600	72.089	137,57%
2	Luasan Daerah Perkebunan (Ha)	16.868	41.406,5	245,473%
3	Produktivitas Padi per Ha	4	3,5	87,5%
4	Produktivitas Jagung Per Ha	4	3,8	95%
5	Produksi Tanaman Perkebunan	16.868	16.767,02	99,40%

Sasaran 28 : Meningkatnya cakupan keluarga berencana

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 88,50% dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ratio Akseptor KB	61	88,50	88,50
Rata-rata		61	88,50	88,50

Sasaran 29 : Meningkatnya kunjungan wisatawan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 62,44 % dengan predikat cukup berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 5 Program 9 Kegiatan dengan 4 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan lokasi wisata yang di kembangkan (%)	58	41,67	71,84
2	Jumlah kunjungan wisatawan	16.037	13.127	81,85
3	Cakupan sarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi (%)	100	20	20
4	Cakupan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diberikan pelatihan pengembangan Kompetensi (%)	75	57,07	76,09

Sasaran 30: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Kebencanaan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai - 15 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program 3 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat waktu tangga (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	Lebih Dari 15 Menit	Lebih Dari 15 Menit

Sasaran 31 : Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 223,67 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam Usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan dengan menetapkan 1 indikator kinerja Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Konten dan perencanaan Media komunikasi Publik	30.260.500	28.547.770	94
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	64.050.000	63.980.000	99
3	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitran komunitas	598.500.000	552.601.940	92

Sasaran 32 : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas

Kinerja Sasaran ini mencapai 76,67 % dengan predikat **berhasil**. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 4 Program dan 10 kegiatan dengan 6 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik (%)	100	80,92	80,92
2.	Cakupan desa yang menetapkan produk Hukum Desa	100	100	100
3.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	100	90,62	90,62
4.	Cakupan desa yang memiliki profil desa dan evaluasi perkembangan desa	39	0	0
5.	Persentase nilai survey kepuasan masyarakat (nilai SKM)	82	80	97,56
6.	Akuntabilitas kinerja DPMPTSP (nilai sakip)	77	70	90,91

Sasaran 33 : Berkurangnya kemiskinan

Kinerja Sasaran ini mencapai 60,73% dengan predikat **cukup berhasil**. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 3 Program dan 6 kegiatan dengan 6 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	15	15	100
2	Persentase desa yang berkinerja baik terhadap penanganan stunting	100	100	100
3	Cakupan peningkatan jumlah industri rumah tangga perdesaan yang menggunakan teknologi tepat waktu	10	0	0
4	Cakupan desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi yang produktif	100	0	0
5	Cakupan BUMDES aktif	20,80	11,11	53,41
6	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	75	83,81	111

Sasaran 34 : Meningkatnya Jumlah Koperasi

Kinerja Sasaran ini mencapai 58,93 % dengan predikat Cukup **berhasil**. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 5 Program dan 5 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cakupan Bina Koperasi/Usaha Simpan Pinjam (%)	56	33	58,93

Sasaran 35 : Meningkatnya Usaha Mikro

Kinerja Sasaran ini mencapai 80 % dengan predikat **berhasil**. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 2 Program dan 4 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	200	160	80

Sasaran 36 : Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang di berdayakan

Kinerja Sasaran ini mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan (%)	40	40	100

Sasaran 37 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kinerja Sasaran ini mencapai 36 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	480	175	36%

Sasaran 38 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial

Kinerja Sasaran ini mencapai 76 % dengan predikat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	230	118	76

Sasaran 39 : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Kinerja Sasaran ini mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	500	500	100

Sasaran 40 : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Kinerja Sasaran ini mencapai 36 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	480	175	36

Sasaran 41 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota

Kinerja Sasaran ini mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, menetapkan 1 Program dan 1 Kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	40.000	40.000	100

Sasaran 42 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 129,84 %dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 4 Program dan 5 kegiatan dengan 9 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan penerbitan kartu keluarga (%)	100%	100%	100%
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	97,74%	97,23%	99,48%
3	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (%)	20,68%	13,06%	63,15%
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	22,43%	33,40%	148,91%
5	Rasio pasangan berakte nikah (%)	48,33%	8,33%	17,23%
6	Cakupan penerbitan akta kematian (%)	61,27%	43,24%	70,58%
7	Database kependudukan skala kabupaten (persentase database valid/akurasi) (%)	Ada	Ada	ada
8	Persentase pertumbuhan jumlah penduduk (%)	0,50%	2,16%	432%
9	Jumlah lembaga pengguna data kependudukan	109	117	107,34%

Sasaran 43: Meningkatnya Perdagangan dalam daerah

Kinerja sasaran ini mencapai 65% %dengan predikat cukup berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 6 program dan 7 kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Bina usaha Pegadang/Usaha Informal presentasi jumlah pasar yang di fasilitasi pengelolaan sarana perdagangan	100	65,2	65,2

Sasaran 44 : Meningkatnya IKM serta Industri Kecil

Kinerja sasaran ini mencapai 70 % dengan predikat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 2 program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Industri Kecil Menengah (%)	40	14	35
2	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	14	14	100

Sasaran 45 : Meningkatnya ketangguhan bencana daerah

Kinerja sasaran ini mencapai 69,44 % dengan predikat cukup berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 1 program dan 3 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	100	69,44	69,44

Sasaran 46 : Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Prestasi Keolahragaan

Kinerja sasaran ini mencapai 77,6 % dengan predikat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 2 program dan 4 kegiatan dengan 5 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	50	20	40%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	50	0	0%
3	Peningkatan prestasi olahraga	15	20	133%
4	Persentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	70	63	90%
5	Cakupan daerah/sekolah membentuk perangkat yang organisasi kepramukaan	60	75	125%

Sasaran 47 : meningkatnya produk hukum yang berkualitas

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase produk hukum daerah yang harmomis dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100

Sasaran 48 : Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pembinaan Penyuluhan Hukum Dan Kadarkum

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 Program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100	100	100

Sasaran 49 : Meningkatnya Pengkajian Produk Hukum Dan Pengolahan Dokumentasi Produk Hukum Yang Berkualitas

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 (satu) Program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak pada table berikut ini :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase produk hukum yang publikasikan/penyuluhan hukum di	100	100	100
2	Jumlah laporan rencana aksi HAM	100	6 laporan	100

Sasaran 50 : Meningkatnya rumah berakses air bersih

Kinerja sasaran ini mencapai 25,3 % dengan predikat tidak berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, di tetapkan 4 program dan 4 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase penduduk berakses air minum	100	25,3	25,3

Sasaran 51 : Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik

Kinerja sasaran ini mencapai 69,02 % dengan predikat cukup berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, di tetapkan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengah 2 indikator kinerja pencapaian 1 sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	1	0,57	57,04
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	100	81	81,00

Sasaran 52 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian

Kinerja sasaran ini mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, di tetapkan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengah 2 (dua) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase rapat koordinasi bidang perekonomian dan SDA	100	100	100
2	Persentase sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian dan SDA	100	100	100

Sasaran 53 : meningkatnya toleransi antar umat beragama

Kinerja sasaran ini mencapai 95 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, di tetapkan 1 program dan 6 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Pelayanan Keagamaan	100	95	95

Sasaran 54 : Meningkatnya Produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dan Perkebunan

Kinerja sasaran ini mencapai 89,68 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, di tetapkan 3 program dan 8 kegiatan dengah 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan kelompok usaha peternakan yang dibina (%)	100	100	100%
2	Jumlah kelompok ternak penerima bantuan sarana prasarana peternakan dan ternak (kelompok)	54 kelompok	49	90,74%
3	Jumlah populasi ternak (ekor)	89,938 ekor	97,256 ekor	108%
4	Cakupan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan (%)	100	60	60%

Sasaran 55 : Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel,Inovatif, Dan Profesional

Kinerja sasaran ini mencapai 96,74 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, di tetapkan 1 program dan 3 kegiatan dengah 4 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut :

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase jumlah OPD yang mengumpulkan LPPD dan LKPj tepat waktu	100	90	90%
2	Persentase capaian pelaksanaan SPM	100	90	90%
3	Persentase penyusunan dokumen rupa bumi	100	90	90%
4	Persentase penysunan dokumen jawaban pemerintah	100	90	90%

Sasaran 56 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan pendidikan masyarakat

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 124 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 3 Program dan 17 Kegiatan dengan 17 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Pendidikan anak usia dini (PAUD)	68,6	31,36	46.47%
2	Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	97,1	97,33	100%
3	Angka Partisipasi sekolah (APS) SMP/MI/Paket A (%)	66,77	95,72	145%
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ paket A	97,01	83,67	86,24%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MI/ paket A	66,77	65,04	97,40%
6	Nilai rata-rata hasil Asesmen nasional SD/MI	71,39	80,00	112%
7	Nilai rata-rata hasil Asesmen nasional SMP/MI	64,28	64	99,56%
8	Angka putus sekolah (APTs) SD/MI	1,06	1,02	96,22%
9	Angka putus sekolah (APTs) SMP/MI	2,03	5,2	40,43%
10	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,63	114	117%
11	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MI ke SMA/MTs	97,22	101	103%
12	Persentase sekolah berakreditasi A	6,87	0,02	0,29
13	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	77,82	72,69	99,82%
14	Cakupan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	45	65,72	146%
15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV	76,22	77,96	102%
16	Cakupan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	98	304	310%
17	Rata-rata lama sekolah	9	9	100%

Sasaran 57 : Berkembangnya Pariwisata Daerah dan Pelestarian Budaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 3 Program dan 5 Kegiatan dengan 5 Indikator. Pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Kampung Adat yang direvitalisasi (%)	100	100	100%
2	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	1	1	100%
3	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan	25	25	100%
4	Jumlah cagar budaya kelola secara terpadu (%)	25	25	100%
5	Cakupan revitalisasi sarana dan prasarana museum (%)	0	0	100%

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam usaha mewujudkan **57** sasaran kinerja dari **57** sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 telah dilaksanakan **110** program dan **183** kegiatan (termasuk kegiatan penunjang) dengan **141** indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada **Bab III** tersebut di atas, maka dapat diambil simpul-simpul sebagai berikut :

1. Rata-rata pencapaian kinerja dari **57** sasaran adalah 6 Mengacu pada Skala Pengukuran Ordinal, maka pencapaian kinerja tersebut dikategorikan **Berhasil** sesuai dengan standar 70%-84% atau lebih.
2. Pencapaian kinerja sasaran pada nomor satu tersebut di atas, bersifat umum dan tidak mencerminkan keberhasilan yang sama untuk masing-masing sasaran. Karena pencapaian kinerja sasaran tersebut disumbangkan oleh **31 sasaran** yang **sangat berhasil** mencapai **85%-100%** atau lebih, **7 sasaran** yang **berhasil** mencapai **70%-84%**, **12** yang **cukup berhasil** mencapai **55%-69%**, **9** sasaran **tidak berhasil** mencapai **< 50%**.
3. Sasaran-sasaran yang dikategorikan **Sangat Berhasil** dengan pencapaian kinerja 85%-100% atau lebih adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
 2. Tumbuhnya perekonomian daerah secara stabil dan berkelanjutan
 3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
 4. Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah
 5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 6. Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan
 7. Meningkatnya pelayanan pengelolaan asset
 8. Meningkatnya persentase pembahasan Ranperda dan risalah rapat
 9. Meningkatnya aspirasi masyarakat

10. Meningkatkan pelayanan publik dan Kualiatas Sumber Daya Aparatur (Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyebarluasan Informasi)
11. Meningkatkan kualitas pelayanan public
12. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah
13. Meningkatkan ketersediaan Akseibilitas, Kualitas dan Keamanan Pangan
14. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meningkatkan kesetaraan gender di kalangan masyarakat
15. Meningkatkan luasan daerah produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan
16. Meningkatkan cakupan keluarga berencana
17. Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
18. Cakupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang di berdayakan
19. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
20. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakuoan Kabupaten/Kota
21. meningkatnya produk hukum yang berkualitas
22. meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan kadarkum
23. Meningkatkan pengkajian produk hukum dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang berkualitas
24. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian
25. meningkatnya toleransi antar umat beragama
26. meningkatnya produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan
27. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional
28. Meningkatkan Kualitas Pelayanan pendidikan masyarakat
29. Berkembangnya Pariwisata Daerah dan Pelestarian Budaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian

4. Sasaran-sasaran yang dikategorikan Berhasil dengan capaian kinerja 70%-84% adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah
 2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
 3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan aset
 4. Meningkatnya Usaha Mikro
 5. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial
 6. Meningkatnya IKM serta Industri Kecil
 7. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Prestasi Keolahragaan
5. Sasaran –sasaran yang dikategorikan Cukup Berhasil dengan pencapaian kinerja 0%-54% adalah sebagai berikut :
 1. Menurunnya Angka Kematian Jumlah Balita Gizi Buruk
 2. Meningkatnya Indikator Pelayanan SPM
 3. Meningkatnya Rumah Layak Huni
 4. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
 5. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah yang profesional, transparan, bersih dan melayani
 6. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
 7. Meningkatnya kunjungan wisatawan
 8. Meningkatnya Jumlah Koperasi
 9. Berkurangnya kemiskinan
 10. Meningkatnya Perdagangan dalam daerah
 11. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
 12. Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik
6. Sasaran –sasaran yang dikategorikan Tidak Berhasil dengan pencapaian kinerja 0%-54% adalah sebagai berikut :
 1. Menurunnya jumlah *Stunting*
 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi
 3. Menurunnya Angka Kematian Ibu
 4. Menurunnya Angka Jumlah Kasus Malaria
 5. Meningkatnya akses transportasi pada pusat permukiman
 6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Kebencanaan
 7. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 8. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 9. Meningkatnya rumah berakses air bersih

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Rencana tindak strategis peningkatan kinerja sebagai upaya antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan atau kurang berhasil pencapaian kinerja sasaran-sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2024 yaitu :

1. Perencanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, perlu dikendalikan secara baik melalui asistensi dengan mengacu pada pencapaian kinerja-kinerja sebelumnya dan kapasitas daya dukung aparatur yang ada, sehingga taat asas efisiensi dan efektivitas
2. Meningkatkan disiplin kerja dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kerja aparatur pegawai.
4. Perlu regulasi yang mengatur adanya *Penghargaan dan Penghukuman* bagi para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) yang mencapai kinerja *Berhasil dan Tidak Berhasil*, sehingga terjadi kompetisi antar-PD untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut.
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Demikian LKIP ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan pada masa-masa yang akan datang.

Tambolaka, 20 Maret 2025

 **BUPATI SUMBA BARAT DAYA,**
YRATU NGADU BONNU WULLA, S.T

